

## RINGKASAN

**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK REKLAME ISIDENTIL DAN REKLAME TETAP PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER,** Fika Amin Nur Aini, D42221138, Tahun 2025, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember.

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional dengan program pendidikan yang memprioritaskan kegiatan belajar mengajar pada peningkatan skill mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendidikan vokasional tersebut memiliki sistem pembagian belajar mengajar sebesar 60% praktik dan 40% teori, Kegiatan Magang merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan pada awal semester VII untuk jenjang Sarjana Terapan termasuk mahasiswa pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik dengan bobot 20 SKS setara dengan 700 jam. Terdapat empat Bidang diantaranya Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait dengan hasil kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung di Badan Pendapatan Daerah untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S. Tr). Tujuan khusus dari laporan ini yaitu untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan Prosedur Pembayaran SKPD Pajak Reklame Insidentil dan Reklame Tetap pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember.

Kegiatan yang dilaksanakan berfokus pada pelayanan administrasi perpajakan dan pengelolaan dokumen terkait pendapatan daerah. Tugas yang ditangani meliputi pendampingan wajib pajak dalam proses penerbitan SKPD Pajak Reklame Insidentil

dan Reklame Tetap,Serta pengimputan pengajuan PBB, Pencetakan SPPT dan SKPDKB.

Prosedur pembuatan SKPD Pajak Reklame Insidentil dan Reklame Tetap diawali dengan proses pendataan objek pajak. Hasil dari Pendataan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, penilaian tarif pajak, serta penerbitan SKPD melalui aplikasi APDL. Laporan ini juga menjelaskan tentang peran dari setiap unit yang terlibat, serta kendala teknis yang kerap ditemui, seperti ketidaksesuaian antara pembayaran pajak dan pengajuan izin reklame.